

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi Sektor Publik merupakan sistem akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintah atau lembaga-lembaga publik yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Masyarakat mengharapkan lembaga publik agar dapat mengelola anggaran secara terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan, seperti kecurangan atau penyalahgunaan wewenang.

Kunci pokok permasalahan akuntansi sektor publik saat ini adalah kurangnya aksesibilitas informasi dan data. Kalau kendala ini belum terpecahkan, masyarakat tidak akan bisa melakukan pengawasan. Walau ada Undang-Undang Keterbukaan Publik, implementasi di lapangan belum menunjukkan sinyal positif. Di sejumlah daerah, RKA SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masih menjadi dokumen rahasia. Masyarakat tidak tahu detail anggaran pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban program tersebut. Dalam kasus ini terlihat bahwa porsi pengawasan masyarakat dalam kontrol anggaran masih sangat kurang.

Transparansi dan Akuntabilitas diperlukan agar pemerintah dapat menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas, kegiatan, dan segala informasi kepada masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu elemen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), adanya pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak (Pertiwi, 2015:2).

Pengelolaan anggaran yang baik dapat tercapai dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri maupun lembaga pengawas khusus lainnya yang bertugas dalam mengontrol proses perencanaan dan pengelolaan anggaran. Pengawasan (*controlling*) merupakan proses pemantauan kegiatan untuk menjaga bahwa suatu kegiatan dilaksanakan terarah dan menuju kepada tercapainya tujuan yang

telah direncanakan dengan mengadakan penilaian, tindakan kooperatif terhadap kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau kurang tepat dengan sasaran yang dituju (Sukirno, 2015:99). Pengawasan terhadap anggaran diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan anggaran saat ini adalah menguatnya tuntutan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas oleh organisasi sektor publik seperti unit-unit kerja pemerintah, baik pusat maupun daerah. Permasalahan yang umum terjadi di SKPD berkaitan dengan pengelolaan anggaran adalah belum sesuai dengan konsep *value for money* dimana pengelolaan anggaran belum mencerminkan konsep ekonomis dimana masih banyak alokasi anggaran yang harga yang lebih tinggi dari spesifikasi dasar harga di pasaran, belum mencerminkan konsep efektif dan efisien dimana berdasarkan input yang tidak ekonomis tersebut menyebabkan output yang dihasilkan juga tidak efisien serta penggunaan anggaran juga tidak efektif karena terjadi pemborosan-pemborosan di beberapa sektor anggaran yang seharusnya dapat lebih ditekn dari segi biaya dan waktu pelaksanaan.

Fenomena yang terjadi tersebut terkait dengan permasalahan mengenai transparansi dalam penyusunan anggaran dimana banyak alokasi dari anggaran yang masuk tidak banyak diketahui oleh publik. Akuntabilitas dari penyusunan anggaran juga menjadi permasalahan dimana penetapan besaran anggaran yang terkesan asal tembak disesuaikan dengan kondisi real yang ada di lapangan serta penyusunan yang tidak melibatkan orang-orang yang berkompetensi dibidang akuntansi atau akuntan publik. Permasalahan tersebut semakin rumit dikarenakan pengawasan yang juga lemah dimana pengawasan sejak dari penyusunan anggaran sampai dengan penggunaan anggaran yang terkesan tau sama atau menyebabkan fungsi pengawasan penggunaan anggaran hanya terkesan formalitas saja. Jika terdapat pelanggaranpun tidak ada tindakan tegas yang dilakukan ataupun upaya perbaikan yang dilakukan dalam proses penyusunan anggaran berikutnya.

Keseluruhan permasalahan pengelolaan anggaran di Kota Metro terlihat juga pada pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang masih menjadi retorika dan belum keseluruhan daerah melakukan dengan benar. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh kebijakan kepala daerah, hasil reses DPRD dan Program dari SKPD. Kondisi ini berakibat

timbulnya akumulasi kekecewaan di tingkat desa dan kecamatan yang sudah memenuhi kewajiban membuat rencana tapi realisasinya sangat minim. Koordinasi antar SKPD untuk proses perencanaan masih lemah sehingga kegiatan yang dibangun jarang yang sinergis bahkan tidak jarang muncul egosektoral, selain itu belum ada instrument yang praktis yang bisa digunakan untuk evaluasi anggaran tersebut (Fachturrahman, 2018)

Pengelolaan anggaran yang baik merupakan prinsip dari *Value For Money*. *Value For Money* memiliki tiga elemen utama yang mendasar yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo 2012:4). Implementasi konsep *Value For Money* sangat mutlak untuk dilakukan, karena dapat memperbaiki kinerja sektor publik. *Value For Money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai *output* yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Mardiasmo, 2015:7).

Hanafiah, dkk (2016) menyimpulkan akuntabilitas, transparansi, pengawasan internal, dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian dari Ratih Muji Astuti (2013) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Fungsi pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada DPPKAD Kabupaten Grobogan) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan hasil penelitian dari Adiwiraya (2015) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja, sedangkan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan dari paparan di atas maka konsep *Value For Money* dapat tercapai apabila penyusunan anggaran tersebut dilaksanakan dengan melakukan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan dilakukan pengawasan dengan baik, maka penelitian bertujuan untuk menganalisis apakah transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran Berdasarkan konsep *Value For Money* pada instansi pemerintah di Kota Metro, yang memfokuskan penelitian terhadap pegawai bidang akuntansi, keuangan, dan bendahara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran berdasarkan Konsep *Value For Money* pada SKPD di Kota Metro?
2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran berdasarkan Konsep *Value For Money* pada SKPD di Kota Metro?
3. Apakah Pengawasan berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran berdasarkan Konsep *Value For Money* pada SKPD di Kota Metro?
4. Apakah Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran berdasarkan Konsep *Value For Money* pada SKPD di Kota Metro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran berdasarkan Konsep *Value For Money* pada instansi pemerintah di Kota Metro.
2. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Anggaran berdasarkan Konsep *Value For Money* pada instansi pemerintah di Kota Metro.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan terhadap Pengelolaan Anggaran berdasarkan Konsep *Value For Money* pada instansi pemerintah di Kota Metro.
4. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Anggaran berdasarkan Konsep *Value For Money* pada instansi pemerintah di Kota Metro.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sehingga dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengelolaan anggaran yaitu tentang Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan dengan konsep *Value For Money*.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan adanya transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas pada pengelolaan anggaran yang pengukuran kinerjanya menggunakan konsep *Value For Money*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi atau sebagai bahan referensi dan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan serta pemahaman tentang pengelolaan anggaran dengan konsep *Value For Money*.

4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada publik mengenai pengelolaan anggaran yang dilakukan pada pemerintahan berdasarkan konsep *Value For Money*.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sifat penelitian : Penelitian kuantitatif
2. Populasi Penelitian : seluruh Pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Metro
3. Sampel Penelitian : Pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat DPRD, Perwakilan Dinas Daerah di Dinas Pendidikan serta Perwakilan Lembaga Teknis Daerah pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Objek penelitian : Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran berdasarkan konsep *value for money*.
5. Tempat penelitian : Kegiatan penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

Sekretariat DPRD, Perwakilan Dinas Daerah di Dinas Pendidikan serta Perwakilan Lembaga Teknis Daerah pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

F. Sistematika Penulisan

Berikut ini merupakan gambaran masing-masing BAB yang merupakan bagian dari sistematika penulisan:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Ruang Lingkup Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIK

Dalam bab ini berisi kajian teoritik yang memaparkan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang selanjutnya digunakan dalam landasan pembahasan dan pemecahan masalah, serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi jenis penelitian, objek dan waktu penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan alat analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran berdasarkan konsep *Value For Money*.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, saran untuk perbaikan yang ditujukan untuk peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang, dan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR LITERATUR

LAMPIRAN